



SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HARI OEANG KE-71 TAHUN 2017

“Sinergi Manajemen Aset, *Treasury*, dan Pembiayaan Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia”

Jakarta, 24 Oktober 2017 – Kementerian Keuangan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Seminar Nasional Hari Oeang Ke-71 Tahun 2017 pada 18-26 Oktober 2017 di gedung Dhanapala. Seminar diadakan sebagai rangkaian Seminar Hari Oeang ke-71. Seminar *pre-heating* mengambil tema desentralisasi fiskal, perlindungan dan jaminan sosial, efektivitas dan efisiensi belanja, percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas laporan keuangan pemerintah serta reformasi perpajakan dan bea cukai. Adapun seminar utama terkait menuju kekuatan baru ekonomi melalui transformasi digital. Rangkaian seminar tersebut dimaksudkan untuk menjawab tantangan APBN sebagai penggerak perekonomian khususnya di era digital. Melalui rangkaian seminar ini, diharapkan masyarakat memahami proses reformasi dan transformasi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan, termasuk di era digital, dan APBN digunakan sebagai alat untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Seminar hari ini mengusung tema “Sinergi Manajemen Aset, *Treasury*, dan Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia” dengan pembahasan mengenai pentingnya sinergi kelembagaan dalam mendorong *creative financing* bagi pembangunan infrastruktur. Seminar kali ini melibatkan peserta dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pentingnya sinergi kelembagaan baik pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur karena infrastruktur bukanlah suatu kemewahan ataupun hobi, melainkan kebutuhan untuk membuat manusia hidup sebagai manusia yang mempunyai martabat.

Lambatnya laju pertumbuhan dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, belum membaiknya harga komoditas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih rendah. Untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, ketersediaan infrastruktur yang dapat mendorong investasi pada sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah secara konsisten menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama.

Tantangan pembangunan infrastruktur tidak hanya pada pembiayaan, namun juga *institutional arrangement* yang memadai untuk dapat memenuhi target ketersediaan infrastruktur baik dari sisi input (sumber dana), proses (pemilihan skema dan kelembagaan), maupun output (ketersediaan infrastruktur dan *delivery* ke publik). Usaha yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain (1) menyelaraskan kepentingan antar *stakeholder*, tidak hanya pemerintah tetapi juga swasta; (2) skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif harus dievaluasi apakah sesuai dengan konteks Indonesia di berbagai sektor infrastruktur; dan (3) pasar modal Indonesia harus dikembangkan untuk menyalurkan investasi jangka panjangnya ke infrastruktur.

Beberapa instansi terkait dibidang infrastruktur telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyiapkan keseluruhan proses pembangunan infrastruktur di berbagai sektor termasuk dalam hal pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur oleh Pemerintah melalui APBN/APBD dibantu oleh partisipasi BUMN dan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnerships*.

Kementerian Keuangan mendukung pembangunan infrastruktur dengan prioritas untuk meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui (a) pinjaman proyek dari lembaga multilateral, bilateral dan lembaga keuangan komersil; (b) proyek surat berharga syariah negara dalam bentuk underlying Sukuk dan proyek pembiayaan Sukuk; (c) pemberian fasilitas fasilitas PDF, VGF, AP, Fasilitas Jaminan Pemerintah, Fasilitas Perpajakan, Pengadaan Tanah, dan sebagainya; serta (d) penugasan BUMN pada Proyek Strategis Nasional, untuk jaminan kredit dan kelayakan usaha.

Penyiapan pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak sehingga pembangunan *institutional arrangement* yang baik dalam pembiayaan infrastruktur perlu dilakukan. Keberhasilan pembiayaan infrastruktur tidak bisa terlepas dari aspek kelembagaan. Hubungan antar unit terkait pembiayaan infrastruktur menjadi sangat krusial untuk terus ditingkatkan, dimana setiap unit harus mampu bersinergi dengan mengedepankan profesionalisme.

Adanya kelembagaan yang baik harus mampu mengoptimalkan sumber dana yang ada secara efisien, mampu menarik sumber pembiayaan yang baru dengan biaya rendah, dan mendorong partisipasi *private sector* yang saya kira masih perlu ditingkatkan lagi. Dari sisi proses, kelembagaan dan skema yang dipilih harus benar-benar dijaga agar dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai dilaksanakan secara efisien, sedangkan dari sisi output, tersedianya infrastruktur dengan kualitas yang baik akan memastikan terjaganya kualitas layanan kita kepada masyarakat. Disamping itu, sinergi antar lembaga dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur juga penting karena kebutuhan penyediaan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang dapat dinikmati dan dinilai langsung oleh masyarakat.

Seminar hari ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dan diskusi antar lembaga dalam meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur publik dan dapat menjadi pembelajaran berharga untuk menetapkan langkah-langkah Kementerian Keuangan selanjutnya dalam upaya pengembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Info lebih lanjut hubungi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta
Telp. (021) 3450959

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 7,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta
Telp. (021) 1500991

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
Gedung Frans Seda, Jalan Doktor Wahidin Raya No. 1, Jakarta
Telp. (021) 3505052, 3510721; Fax. (021) 3447386
E-mail: iru.djppr@kemenkeu.go.id